

**DAMPAK PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT
DI PROVINSI LAMPUNG**

(SKRIPSI)

Oleh

ADELIA CHAIRUNNISA PANE

2116041090



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

DAMPAK PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

ADELIA CHAIRUNNISA PANE

Semakin sempitnya lapangan kerja dan kesulitan dalam mencari pekerjaan, menyebabkan masyarakat khususnya di Provinsi Lampung menghadapi kesulitan dalam aspek perekonomian. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah terus mendorong pemberdayaan sektor UMKM, mengingat sektor ini dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menjadi solusi untuk mengurangi terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada. Namun keterbatasan modal menjadi permasalahan utama bagi sektor UMKM. dalam mengatasi permasalahan ini pemerintah menanggapi Inpres No.6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM dengan memulai program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2007. Program KUR merupakan program penyediaan pinjaman atau dana untuk digunakan sebagai modal kerja atau investasi kepada peminjam yang telah menunjukkan produktivitas dan kredibilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah teridentifikasinya dampak program KUR di Provinsi Lampung. Hasil penelitian berdasarkan dimensi dampak kebijakan Langbein (Wibawa, 1994), menunjukkan bahwa program KUR terbukti telah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang sebelumnya sulit menjangkau kredit formal. Secara non-ekonomis, program KUR turut mendorong pengetahuan dan keterampilan manajerial masyarakat penerima KUR melalui proses pengajuan kredit, pelaporan usaha, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan usaha. Penelitian ini juga menemukan dampak yang tidak diharapkan seperti meningkatnya kredit bermasalah dan munculnya skema graduasi yang menyebabkan penurunan penyaluran KUR di tahun 2023. Secara keseluruhan, program KUR di Provinsi Lampung memberikan dampak yang dominan positif, namun perlu disempurnakan dari sisi regulasi, pendampingan, dan fleksibilitas kebijakan agar dapat lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan pelaku usaha rintisan.

Kata Kunci : Dampak Program, Kredit Usaha Rakyat, UMKM.

ABSTRACT

THE IMPACT OF MICRO CREDIT PROGRAM'S IN LAMPUNG PROVINCE

By

ADELIA CHAIRUNNISA PANE

The narrower the job field and the difficulty in finding a job, cause the community, especially in Lampung Province, to face difficulties in the economic aspect. In an effort to overcome these problems, the government continues to encourage the empowerment of the UMKM sector, considering that this sector can absorb a large number of workers and become a solution to reduce the limited availability of existing jobs. However, limited capital is the main problem for the UMKM sector. In overcoming this problem, the government responded to President's instruction No.6 of 2007 regarding the policy of accelerating the development of the real sector and the empowerment of MSMEs by starting the People's Business Credit (KUR) program in 2007. The KUR program is a program of providing loans or funds to be used as working capital or investment to borrowers who have shown productivity and credibility. The purpose of this research is to identify the impact of the KUR program in Lampung Province. Research results based on the impact dimension of Langbein's policy (Wibawa, 1994), show that the KUR program has been proven to have expanded financing access for business actors who previously had difficulty reaching formal credit. Non-economically, the KUR program also encourages the knowledge and managerial skills of the KUR recipient community through the credit application process, business reporting, and the utilization of digital technology in business management. This study also found unexpected impacts such as increasing credit problems and the emergence of a graduation scheme that caused a decrease in KUR distribution in 2023. Overall, the KUR program in Lampung Province has a positive dominant impact, but it needs to be improved in terms of regulation, assistance, and policy flexibility so that it can be more adaptive to economic dynamics and the needs of start-up business actors.

Keywords: Program Impact, Micro Credits, UMKM.

**DAMPAK PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT
DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

ADELIA CHAIRUNNISA PANE

SKRIPSI

**Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Juruan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

Judul Skripsi : **DAMPAK PROGRAM KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : ***Adefia Chairunnisa Pane***

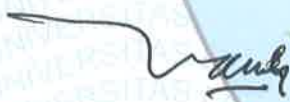
Nomor Pokok Mahasiswa : **2116041090**

Program Studi : **Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

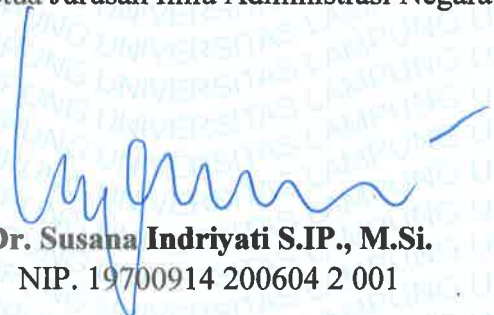


1. **Komisi Pembimbing**


Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.
NIP. 19763026 198803 1 002


Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.
NIP. 19821212 200801 2 017

2. **Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**


Dr. Susana Indriyati S.IP., M.Si.
NIP. 19700914 200604 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.

Sekretaris : Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.

Penguji Utama : Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 Juli 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 22 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,



Adelia Chairunnisa Pane
NPM. 2116041090

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Adelia Chairunnisa Pane yang lahir di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada tanggal 5 Oktober 2004. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Putri dari pasangan Bapak Bangun Rian A. Pane dan Ibu Laila Qodariah. Penulis memulai pendidikan formalnya dari Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Islam di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya menempuh pendidikan sekolah dasar di MI MMA IV Sukabumi Kota Bandar Lampung. Melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bandar Lampung. Lalu melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung. Lalu melanjutkan Studi Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus. Penulis mengikuti Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara sebagai anggota bidang Kajian Pengembangan Keilmuan. Penulis juga telah menjalankan magang di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung selama dua bulan pada Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 6)

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”

(HR. Thabrani)

*“When things get hard, stop for awhile and look back
and see how far you’ve come”*

(Ria SW)

“Good things don’t last, life moves so fast”

(Billie Eilish)

“Everyone has their own way”

(Adelia Chairunnisa Pane)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Atas izin-Nya, penulis diberi kemudahan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur. Tanpa pertolongan dan ridho-Nya, pencapaian ini tentu tak akan terwujud. Dengan sepenuh hati, penulis mempersembahkan karya ini kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Bangun Rian A. Pane dan Ibu Laila Qodariah. Segala pencapaian ini tidak lepas dari doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang tiada henti dalam menemani penulis selama menjalani proses penelitian. Terima kasih atas kesabaran, dorongan, serta segala bentuk dukungan moral maupun materiil yang telah menjadi sumber kekuatan penulis di saat menghadapi kesulitan. Penulis sangat bersyukur memiliki sosok orang tua yang tangguh, penuh cinta, dan tulus dalam mendampingi penulis hingga tercapainya mimpi meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan pengorbanan Bapak dan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda, serta senantiasa dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan. Aamiin.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, rezeki, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung” dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umat beliau. Penulis menyadari bahwa selama menjalani masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini, tidak sedikit tantangan dan kendala yang dihadapi. Namun, berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, semua rintangan tersebut dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof Dr. Bambang Utoyo S, M.Si. selaku dosen pembimbing utama, terima kasih atas segala ilmu, doa, bimbingan, perhatian, motivasi, serta saran dan masukan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran dan ketulusan Prof dalam membimbing sangat berarti bagi penulis. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang Prof berikan, yang telah menjadi dorongan besar hingga penulis dapat menyelesaikan studi sarjana ini dengan baik. Prof adalah sosok panutan yang menginspirasi, dan semua hal yang Prof berikan akan selalu dikenang sebagai bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan keberkahan, kesehatan, kemudahan, dan kebahagiaan bagi Prof serta keluarga di setiap langkah ke depan.
2. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Kedua. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas ilmu, doa, bimbingan, perhatian, motivasi, saran, masukan, dan nasihat yang telah Ibu berikan sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran dan ketulusan Ibu dalam membimbing

menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Setiap materi dan wawasan yang Ibu bagikan turut memperluas pemahaman akademik penulis. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan, serta kemudahan dalam setiap langkah Ibu, dan kebahagiaan yang berlimpah untuk seluruh keluarga.

3. Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si. Selaku dosen penguji. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas waktu, arahan, masukan, serta ilmu berharga yang telah Bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Doa, motivasi, dan bimbingan Bapak sangat berarti dalam mendampingi setiap tahapan yang penulis lalui. Semoga Bapak beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran dalam segala urusan.
4. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) atas segala bimbingan, ilmu, saran, dan masukan yang telah diberikan. Dukungan tersebut sangat membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan hingga menyelesaikan studi. Semoga Ibu selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap urusan, serta terus menjadi pribadi yang menginspirasi bagi seluruh mahasiswa.
5. Dr. Susana Indriyati C, S.IP., M.Si. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama proses pengurusan persyaratan hingga selesainya penelitian ini. Semoga Ibu dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah SWT, serta diberi kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab ke depannya.
6. Penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Terima kasih atas ilmu, dedikasi, dan ketulusan dalam membimbing selama masa studi penulis sebagai mahasiswa. Semoga setiap ilmu yang telah diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis dan teman-teman

mahasiswa dalam menghadapi kehidupan di masa depan, serta menjadi amal jariyah yang terus mengalir dan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

7. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, atas bantuan dan pelayanan administrasi yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi, dari awal hingga selesai. Ucapan khusus disampaikan kepada Mbak Wulan dan Mbak Uki atas kesabaran dan kesigapan dalam membantu pengurusan berbagai berkas administrasi selama masa perkuliahan. Terima kasih atas arahan dan dukungan yang sangat berarti. Semoga seluruh staf jurusan selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kemudahan dalam setiap urusan, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Bapak Bangun Rian A. Pane dan Ibu Laila Qodariah, atas segala pengorbanan dan dukungan yang tiada henti. Terima kasih atas kasih sayang, nasihat, doa, serta pendampingan yang senantiasa menyertai setiap langkah hidup penulis. Terima kasih telah menjadi tempat bersandar dalam suka dan duka, serta memberikan kekuatan di saat penulis hampir menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis sangat menghargai kepercayaan Mama dan Ayah, meskipun belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rezeki, kesehatan, dan umur panjang kepada Mama dan Ayah, serta memperkenankan kalian menyaksikan keberhasilan penulis, baik di dunia maupun di akhirat, sebagai putri bungsu yang kalian cintai. Terima kasih dari lubuk hati terdalam.
9. Terkhusus penulis ucapkan terimakasih yang mendalam kepada kakak-kakak tercinta Annida Maulidya Pane, Apriansyah, Rizky Azhari Pane, dan Dewi Fatmawati Atas segala bantuan yang tak pernah henti diberikan dengan penuh keikhlasan demi tercapainya cita-cita saya meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kekuatan dan dukungan yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkah saya. Semoga Abang, Ayuk, Kakak, dan Mbak senantiasa

dianugerahi kesehatan, kelancaran rezeki, serta kemudahan dalam menjalani kehidupan oleh Allah SWT.

10. Teruntuk Satrio Binandoro yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Tidak hanya sebagai penyemangat, tetapi juga sebagai teman berpikir dan tempat pulang di tengah penatnya proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih untuk kehadiran kamu pada waktu-waktu yang tidak selalu mudah untuk dijalani. Semoga segala yang kita upayakan hari ini dapat menjadi pijakan bagi hari-hari yang lebih baik ke depan *and I'm wishing all the best the world could give to you.*
11. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh informan penelitian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti proses wawancara. Terima kasih atas segala informasi, saran, masukan, serta arahan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini. Dukungan serta kesediaan Bapak dan Ibu untuk berbagi pengetahuan menjadi bagian penting dalam kelancaran pengumpulan data. Semoga segala kebaikan dan kontribusi yang diberikan mendapatkan balasan terbaik dan pahala yang berlipat dari Allah SWT.
12. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, khususnya kepada Bapak Farhan, Bapak Gwen, Mbak Dede, Mbak resta, Mbak Lily, Mbak Cipi, Bapak Ponco dan Bapak Sapri atas segala bentuk dukungan, semangat, dan pendampingan yang telah Bapak dan Ibu berikan selama proses pengumpulan data saat masa magang. Kehadiran dan bantuan yang diberikan sangat membantu kelancaran penelitian ini. Semoga semua kebaikan dan kontribusi tersebut dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.
13. Teruntuk sahabatku, Nadiyah, Aca, Indy, dan Uwi Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan. Kehadiran kalian sebagai sahabat yang selalu ada dalam setiap langkah sangat berarti bagi penulis. Terima kasih atas kebersamaan, canda, dan tawa yang menguatkan selama proses penulisan skripsi. Semoga di masa depan kita bisa dipertemukan kembali dalam kondisi yang lebih baik.

14. Sahabat sedari sekolah menengah pertamaku, Sakinah, Naila, dan Rani terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sejak masa sekolah menengah pertama. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan dukungan yang selalu diberikan hingga hari ini. Kehadiran kalian telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya. Semoga silaturahmi dan persahabatan ini terus terjaga, serta kita semua senantiasa diberi kebahagiaan dan kesuksesan di masa depan.
15. Sahabat sedari sekolah menengah atasku, Bibah, Rusti, Meylan, dan Dewi
Terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat yang telah menemani sejak masa sekolah menengah atas. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, dan semangat yang selalu hadir di setiap langkah perjalanan ini. Kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan tersendiri yang tidak tergantikan. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dan kita semua diberikan jalan terbaik menuju masa depan yang lebih cerah.
16. Kepada seluruh teman-teman Gilgamara (2021) yang tak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan dan perjuangan selama masa kuliah. Bersama kalian, penulis belajar dan tumbuh melalui berbagai dinamika kehidupan kampus yang penuh warna. Terima kasih atas setiap kenangan dan pengalaman berharga yang telah kita bagi. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam versi diri yang lebih baik, dan semoga Allah SWT senantiasa mempermudah setiap langkah kita ke depan.
17. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for beliving in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver, and trying give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori	9
2.2.1 Tinjauan Tentang Evaluasi	9
2.2.2 Tinjauan Tentang Dampak Kebijakan	15
2.2.3 Tinjauan Tentang Kredit Usaha Rakyat	19
2.3 Kerangka Berpikir	23
III. METODE PENELITIAN	26
3.1 Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	26
3.2 Fokus Penelitian	26
3.3 Lokasi Penelitian	28
3.4 Jenis dan Sumber Data	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data	29
3.5.1 Wawancara	29
3.5.2 Dokumentasi	30
3.5.3 Observasi	31

3.6 Teknik Analisis Data	31
3.6.1 Reduksi Data.....	32
3.6.2 Penyajian Data	32
3.6.3 Penarikan Kesimpulan	32
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	33
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.1.1 Provinsi Lampung.....	35
4.1.2 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung	37
4.2 Hasil.....	43
4.2.1 Dimensi Waktu (2020-2024)	46
4.2.2 Selisih Antara Dampak Aktual dan Dampak Yang Diharapkan	49
4.2.3 Tingkat Agregasi Dampak.....	54
4.2.4 Tipe Dampak	58
4.3 Pembahasan	63
4.3.1 Dimensi Waktu	64
4.3.2 Selisih Antara Dampak Aktual dengan Dampak yang diharapkan ...	68
4.3.3 Tingkat Agregasi Dampak.....	73
4.3.4 Tipe Dampak	79
V. PENUTUP	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penyaluran KUR terbesar di Provinsi Lampung.....	4
2. Penelitian Terdahulu Terkait Program Kredit Usaha Rakyat	8
3. Data Informan Wawancara	30
4. Data Dokumen Penelitian	31
5. Jumlah Penduduk dengan Usia Produktif di Provinsi Lampung	37
6. Struktur Organisasi Kanwil DJPb Provinsi Lampung	41
7. Persentase Pertumbuhan Profit Usaha Penerima Program KUR	46
8. Perubahan Kenaikan Omzet Penrima Program KUR	54
9. Perubahan Pengeluaran Rumah Tangga Penerima Program KUR	55
10. Perubahan Pengeluaran Pendidikan Penerima Program KUR.....	56
11. Perubahan Pengeluaran Kesehatan Penerima Program KUR	57
12. Perubahan Perekrutan Tenaga Kerja.....	57
13. Presentase debitur KUR yang terdampak skema graduasi.....	59
14. Dampak Program KUR Dimensi Waktu 2020-2024	66
15. Selisih antara dampak aktual dengan dampak yang diharapkan.....	72
16. Panduan Wawancara	97
17. Tabel Triangulasi	99

DAFTAR GAMBAR

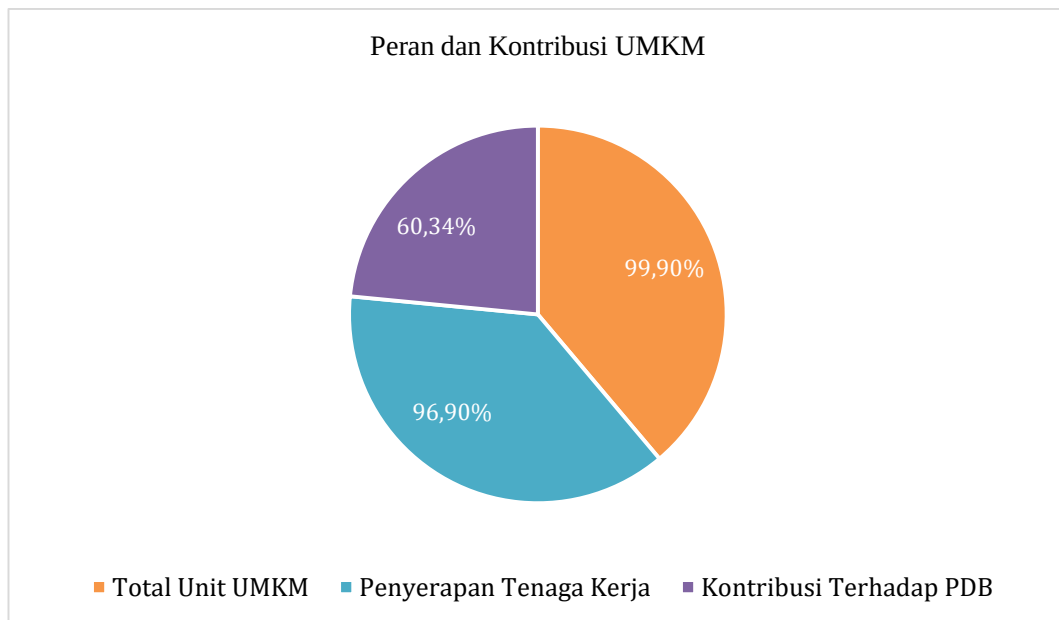
Gambar	Halaman
1. Peran dan Kontribusi UMKM dalam Sektor Perekonomian.....	1
2. Penyaluran KUR dan Penjaminan KUR	20
3. Kerangka Berpikir	25
4. Peta Provinsi Lampung	36
5. Struktur Organisasi Kanwil DJPb Provinsi Lampung	41
6. Penyaluran KUR di Provinsi Lampung Tahun 2020-2024	43
7. Proses Penyaluran KUR.....	45
8. Toko Minyak Curah Ibu Eldhalia	50
9. Lampiran Surat Izin Penelitian.....	95
10. Wawancara dengan Gwen Adhitya Amalkhan, selaku Kepala Seksi PPA IIc Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung.....	96
11. Wawancara dengan Romadhona Puspita Sari, selaku anggota bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung.....	96
12. Wawancara dengan Ibu Eldhalia, selaku masyarakat penerima program Kredit Usaha Rakyat (KUR)	96
13. Toko Kelontong M Sajid.....	96
14. Perizinan untuk menggunakan Data Sekunder dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung.....	96

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin sempitnya lapangan kerja dan kesulitan dalam mencari pekerjaan, menyebabkan masyarakat khususnya di Provinsi Lampung menghadapi kesulitan dalam aspek perekonomian. Hal ini diperburuk dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah dan angka kemiskinan yang masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamental perekonomian Indonesia belum cukup kokoh.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah terus mendorong pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengingat sektor ini dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menjadi solusi untuk mengurangi terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada.



Gambar 1. Peran dan Kontribusi UMKM dalam Sektor Perekonomian

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2024) Data diolah oleh peneliti, 2025

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2024), UMKM memiliki peran dan kontribusi penting dalam sektor perekonomian seperti yang tertera pada gambar 1 di mana total unit usaha UMKM yang mencapai 99,9% dengan kontribusi penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9% serta kontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,34%.

UMKM memiliki eksistensi yang tidak perlu diragukan lagi karena dapat bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi terutama pada pasca krisis ekonomi. Namun dalam prosesnya, UMKM juga menghadapi banyak tantangan mulai dari keterbatasan modal, sumber daya manusia yang rendah, hingga kurangnya penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan (Sudaryanto dan Hanim, 2002).

Keterbatasan modal menjadi permasalahan utama bagi sektor UMKM. Untuk itu, demi mengatasi permasalahan ini pemerintah menanggapi Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memulai program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2007. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2007 lembaga penjaminan, pemerintah, dan perbankan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU). MoU ini kemudian diubah dengan *addendum* pada tanggal 14 Mei 2008 untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada koperasi dan UMKM yang disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu produk bank berupa kredit pembiayaan sebagai modal usaha yang diberikan kepada nasabah dengan harapan menjadi solusi dalam permasalahan perekonomian, kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia. Kredit Usaha Rakyat dalam Pasal 1 dari Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian (PERMENKO) Nomor 8 tahun 2015 yang diganti dengan PERMENKO Nomor 9 Tahun 2016 didefinisikan sebagai penyediaan pinjaman atau dana untuk digunakan sebagai modal kerja dan/atau investasi kepada peminjam yang telah menunjukkan produktivitas dan kredibilitas, meskipun tanpa jaminan tambahan atau jika jaminan tambahan yang dimiliki tidak memadai.

Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

1. Mayoritas debitur KUR berasal dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di sektor-sektor unggulan yang mendukung perekonomian Indonesia.
2. UMKM merupakan bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat yang mencakup petani, nelayan, peternak, penambang, pedagang dan penyedia barang jasa.
3. Sektor UMKM berperan sebagai solusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat dengan kontribusi terhadap ketahanan ekonomi yang tinggi.
4. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam sektor ini serta kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto PDB sangat signifikan (BPS, 2017).

Kemudian, untuk mempercepat pengembangan UMKM, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk mengubah kebijakan KUR yang lebih “pro kerakyatan” sebagai:

1. Menurunkan suku bunga dari 7% menjadi 6%
2. Meningkatkan total plafon KUR dari 140 triliun menjadi 190 triliun pada tahun 2020. Kemudian akan ditingkatkan bertahap hingga 325 triliun pada tahun 2024.
3. Plafon KUR Mikro ditingkatkan dari Rp25.000.000 menjadi Rp50.000.000 per debitur.

Diperkirakan peningkatan akses pada institusi keuangan akan membantu untuk memajukan dan memberdayakan UMKM. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan kemampuan dan perannya dalam mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan (Adam dan Lestari, 2017). Hal ini dikarenakan sebagian besar Rumah Tangga Miskin (RTM) dan berpendapatan rendah menggantungkan hidupnya pada UMKM, sehingga program KUR akan menjadi solusi dalam meningkatkan kapasitas UMKM yang kemudian dapat memperkuat suatu individu atau kelompok dalam hal kemampuan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Menurut Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung (2024) kinerja program Kredit Usaha Rakyat (KUR) s.d 31 desember 2024 berjalan dengan baik dan terus bertumbuh. Hal ini tercermin dari realisasi penyaluran KUR di Provinsi Lampung yang sudah mencapai Rp10,350,45 miliar rupiah dengan angka penerima program KUR yang mencapai 208.614 debitur atau 111,27% dari target penerima. Kemudian penyaluran KUR mengalami peningkatan sebesar 21,57% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total KUR yang sudah direalisasikan tersebut, beberapa daerah di Provinsi Lampung menjadi target penyaluran KUR terbesar seperti yang tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Penyaluran KUR terbesar di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Penyaluran KUR	Debitur
Lampung Tengah	Rp2,47 Triliun	57..500
Lampung Timur	Rp626,25 Miliar	14.490
Lampung Selatan	Rp599,13 Miliar	12.235

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Penyaluran KUR terbesar di Provinsi Lampung diduduki oleh tiga kabupaten di Provinsi Lampung yakni Lampung Tengah dengan angka penyaluran KUR sebesar Rp2,47 triliun kepada 57.500 debitur, kemudian Lampung Timur dengan angka Rp626,25 miliar kepada 14.490 debitur, dan Lampung Selatan dengan angka penyaluran sebesar Rp599,13 miliar kepada 12.235 debitur. Sedangkan penyaluran KUR paling rendah diduduki oleh Kabupaten Pesisir Barat dengan angka penyaluran sebesar Rp94,4 miliar kepada 2.663 debitur.

Sementara itu pada target nasional, kinerja Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat positif pada tahun 2024 dengan realisasi penyaluran KUR yang mencapai Rp280,28 triliun atau 100,10% dari target realisasi. KUR di tahun 2024 bertumbuh sebesar 7,8% (yoy) dan telah disalurkan kepada 4,92 juta debitur (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025).

Meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global maupun domestik, dalam lingkup nasional kualitas penyaluran KUR tetap terjaga dan ditunjukkan melalui tingkat *Non-Performance Loan* (NPL) KUR sebesar 2,19% terjaga di bawah NPL nasional sebesar 2,21%.

Kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian daerah telah menunjukkan keseriusan. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan salah satunya yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi objek dari penelitian ini. Dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas UMKM dapat memunculkan banyak kebermanfaatan. Di samping terciptanya lapangan kerja baru, UMKM juga akan menjadi salah satu faktor dalam meningkatnya pendapatan per kapita dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang terus mendukung keberadaan serta perkembangan UMKM, terutama dalam hal akses pembiayaan, menjadikan dampak dari program kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai hal yang penting untuk diteliti. Fenomena masalah yang terjadi di lapangan dapat dijadikan dasar awal peneliti untuk menganalisis lebih mendalam mengenai dampak program KUR di Provinsi Lampung.

Seperti yang diketahui, program KUR dirancang agar dapat menekan hambatan UMKM dalam memperoleh kredit sehingga dapat berkembang dan berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan sejumlah penelitian sebelumnya yang mengangkat isu serupa, telah menunjukkan hasil bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dalam aspek perekonomian penerimanya di berbagai daerah di Indonesia.

Seperti pada penelitian oleh Putra., dkk (2023) yang menunjukkan hasil bahwa program KUR sebagai kredit mikro berbunga rendah memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga penerimanya, khususnya di provinsi Bali dengan pengeluaran makanan dan non makanan yang cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak menerima program KUR. Kemudian pada penelitian oleh Adha, (2023) yang menunjukkan hasil bahwa program KUR memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan rumah tangga penerima yang tercermin dari indikator-indikator seperti pengeluaran per kapita, pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk non-makanan. Dampak KUR terhadap indikator pengeluaran non makanan

menjadi yang terbesar dari ketiga variabel dengan *outcome* mencapai 18,3% hingga 28,1% lebih tinggi dibandingkan non penerima KUR.

Namun, menurut penelitian serupa oleh Tnanh *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa di Vietnam, kredit mikro tidak berdampak pada total pendapatan dari sumber-sumber yang diperoleh (seperti pertanian, wirausaha, sumber daya milik bersama dan upah). Sementara itu, berbeda dengan hasil penelitian di Bangladesh oleh Khandker & Koolwal, 2015 (Tnanh *et al.*, 2019) kredit mikro ditemukan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap total *output*.

Perbedaan antara beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut menjadi perdebatan mengenai peran program Kredit Usaha Rakyat dan bagaimana dampak yang dihasilkan dari program kebijakan tersebut khususnya di Provinsi Lampung. Maka dari itu, peneliti berpendapat bahwa *gap* tersebut menjadi isu penting untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, berdasarkan urgensi penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis ingin melanjutkan penelitian dengan judul “ Evaluasi Dampak Kredit Usaha Rakyat di Provinsi Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana dampak program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah teridentifikasinya dampak program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang mendalam dan analitis serta kontribusi pemikiran kepada para akademisi mengenai dampak dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengevaluasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung serta menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan, sehingga program KUR dapat memberikan dampak yang lebih tepat sasaran. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang ingin melakukan studi lebih lanjut mengenai dampak program KUR di Provinsi Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian sebelumnya akan digunakan sebagai referensi untuk membantu peneliti dalam memperoleh gambaran pada kerangka berpikir. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut juga bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan isi antara beberapa studi dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat menjadi dasar kajian sehingga dapat memperluas wawasan berpikir peneliti.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu Terkait Program Kredit Usaha Rakyat

No.	Nama Peneliti / Jurnal	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Putra, I. K., Widayat, W., Putra, G. S. A., Aryasa, I. P. G. C. A., & Pramatha, I. M. A. (2023)/ <i>Jurnal Kebijakan Publik</i> , 14(3), 296-302.	Dampak Program Kredit Usaha Rakyat Terhadap Kesejahteraan	Kuantitatif	Program KUR yang merupakan kredit mikro dengan bunga rendah, memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga penerima program KUR, terutama di provinsi Bali dengan pengeluaran makanan dan non makanan yang cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak menerima KUR.
2.	Adha, R. B. (2023)/ <i>Bappenas Working Papers</i> , 6(2), 240-252.	Dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Kesejahteraan Penerima KUR di Indonesia	Kuantitatif	Program KUR memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan rumah tangga penerimanya, seperti yang terlihat dari indikator pengeluaran per kapita, pengeluaran makanan dan pengeluaran non-makanan. Dampak terbesar terlihat pada pengeluaran non-makanan dengan hasil yang mencapai 18,3% hingga 28,1% lebih tinggi dibandingkan dengan

			rumah tangga yang tidak menerima KUR.
3.	Tnanh, T. P., Saito, K., & Duong, B. P. (2019)/ <i>Journal of Policy Modeling</i> (41), 120-139.	Impact of Microcredit on Rural Household Welfare and Economic Growth in Vietnam	Kuantitatif
			Pada tingkat mikro menunjukkan bahwa kredit mikro tidak terlihat dapat meningkatkan total pendapatan dan nilai <i>output</i> . Sedangkan pada tingkat makro menunjukkan bahwa kredit mikro berdampak pada nilai <i>output</i> dan nilai tambah yang meningkat masing-masing 0,37% dan 0,27.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Penelitian terdahulu merupakan acuan yang diterapkan dalam melakukan penelitian yang saat ini sedang dilakukan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berperan signifikan terhadap pertumbuhan tingkat kesejahteraan para penerima program KUR tersebut. Berdasarkan tiga penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan, diketahui terdapat beberapa kemiripan dan pembeda dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kemiripan tersebut terletak pada persamaan pembahasan tentang dampak program Kredit Usaha Rakyat. Sedangkan yang menjadi pembeda terletak pada metode penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan lokus penelitian yang berada di Provinsi Lampung dengan jumlah debitur, karakteristik para pengguna program KUR, hingga jenis usaha yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tinjauan Tentang Evaluasi

A. Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik adalah proses penilaian terhadap kebijakan publik yang mencakup substansi, implementasi, dan dampaknya (Anderson, dalam Kamal Alamsyah 2016). Secara sederhana, evaluasi kebijakan berkaitan dengan penyusunan informasi mengenai nilai atau manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut (Dunn, 1999). Evaluasi juga dapat dipahami sebagai suatu penelitian untuk mengumpulkan,

menganalisis, dan menyajikan informasi yang berguna tentang objek evaluasi yang selanjutnya dibandingkan dengan indikator-indikator yang ada dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan terkait objek evaluasi (Wirawan, 2012). Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah proses untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mencapai hasil yang diinginkan dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target kebijakan yang telah ditetapkan.

Lester and Stewart (Winarno, 2008) membagi evaluasi kebijakan menjadi dua tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah mengidentifikasi konsekuensi-konsekuensi yang timbul akibat suatu kebijakan dengan menggambarkan dampaknya. Tugas kedua adalah menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang sudah ditetapkan. Dari pembagian ini, dapat dipahami bahwa evaluasi kebijakan berkaitan dengan fakta yang mencakup pengukuran dan penilaian terhadap hasil atau dampak dari suatu kebijakan atau program yang pada akhirnya membantu menentukan langkah yang perlu diambil di masa depan (Meutia, 2017).

Fungsi utama dari evaluasi kebijakan adalah untuk menyediakan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan tersebut. Evaluasi bertujuan untuk mengungkap dan mengukur sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan dan nilai yang diharapkan. Fungsi yang kedua adalah sebagai kontribusi dalam mengklarifikasi dan memberikan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari penetapan tujuan dan target kebijakan. Selain itu, evaluasi juga berperan pendukung pelaksanaan prosedur-prosedur lain dalam analisis kebijakan (Meutia, 2017).

Evaluasi mencakup beberapa hal penting diantaranya:

1. Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur performa dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan satu atau sebagian program.
2. Penilaian dilakukan berdasarkan tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan dalam meninjau kembali program serta meningkatkan pelaksanaan program di masa depan.

James Anderson (Winarno, 2008) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe yang masing-masing didasarkan pada pemahaman evaluator terhadap evaluasi, yaitu :

1. Evaluasi kebijakan sebagai kegiatan fungsional

Pada tipe ini, evaluasi dipandang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembuat kebijakan selalu mempertimbangkan dampak dan manfaat dari setiap program yang dijalankan.

2. Evaluasi yang memfokuskan pada pelaksanaan kebijakan

Evaluasi di sini lebih berfokus pada kinerja kebijakan, seperti apakah program yang dijalankan sesuai dengan rencana, berapa anggaran yang digunakan, dan siapa saja yang menjadi sasaran dari program tersebut.

3. Evaluasi sistematis

Pada tahap ini, evaluasi dilakukan secara objektif dengan mengukur dampak program terhadap masyarakat serta menilai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Friensterburch dan Motz (Wibawa, 1994) mengemukakan empat bentuk dalam evaluasi, yaitu :

1. *Single Program After Only*

Pada tahap ini, evaluasi dilakukan dengan mengukur kondisi atau menilai suatu program setelah pelaksanaannya. Evaluasi hanya fokus pada hasil yang dicapai dari program tersebut tanpa membandingkannya dengan kondisi sebelumnya.

2. *Single Program Before-After*

Evaluasi pada tahap ini mengkaji kondisi masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan kondisi sebelum dan sesudah untuk melihat pengaruh atau dampak dari program terhadap kelompok sasaran.

3. *Comparative Program After Only*

Pada tahap ini, evaluasi dilakukan dengan membandingkan dua kelompok masyarakat. Satu kelompok yang terkena dampak program dan satu kelompok yang tidak terkena dampak program setelah program dilaksanakan.

4. *Comparative Program Before-After*

Evaluasi pada tahap ini merupakan pengembangan dari bentuk sebelumnya. Evaluasi dilakukan dengan perbandingan antara dua kelompok masyarakat serta dua dimensi waktu yaitu sebelum dan sesudah program dilaksanakan untuk menilai dampaknya secara lebih komprehensif.

Pada tahapan ini peneliti lebih mengacu pada evaluasi *single program before-after* yang bertujuan untuk mengukur dampak dari program KUR yang telah dibuat oleh pemerintah terhadap permasalahan yang ada. Evaluasi jenis ini dilakukan dengan cara membandingkan data dari periode sebelum kebijakan diterapkan dan sesudah kebijakan dilaksanakan untuk mengukur atau melihat dampak yang ditimbulkan oleh program tersebut.

B. Konsep Evaluasi Program

Program dapat diartikan sebagai suatu unit atau rangkaian kegiatan yang merupakan implementasi dari suatu kebijakan yang berlangsung secara berkesinambungan dan dilakukan dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Akbar dan Mohi (2018) memaparkan tiga unsur penting dalam suatu program yaitu :

1. Program merupakan wujud nyata atau implementasi dari suatu kebijakan.
2. Program berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan bukan kegiatan tunggal, melainkan serangkaian kegiatan yang berkesinambungan.
3. Program dilaksanakan dalam suatu organisasi yang melibatkan partisipasi dari sekelompok orang.

Evaluasi program merupakan proses mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi Tyler (Yusuf, 2008). Tjokroamidjojo (1990) mendefinisikan program sebagai aktivitas sosial terorganisasi dengan tujuan spesifik yang terbatas dalam ruang dan waktu, terdiri dari berbagai proyek yang saling terkait dan biasanya terbatas pada satu atau lebih organisasi. Sementara itu, Nurcholis (2009) mendefinisikan program sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, lembaga, atau masyarakat yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat

disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan suatu kegiatan untuk menilai sejauh mana program yang berasal dari kebijakan pemerintah berjalan sesuai rencana dan apakah *output* yang dihasilkan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui dengan pasti apakah hasil yang dicapai, kemajuan yang diperoleh, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan di masa yang akan datang. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas program dan menemukan area yang perlu diperbaiki. Selain itu, evaluasi kebijakan maupun program juga merupakan bagian penting dari studi kebijakan yang membantu dalam menyempurnakan kebijakan dan pelaksanaannya agar lebih optimal di masa depan.

Dimensi utama evaluasi difokuskan kepada hasil, manfaat, dan dampak yang dihasilkan terkait program itu sendiri. Secara prinsip, evaluasi dapat diukur dengan empat dimensi Bridgman & Davis (Yusuf, 2008) yaitu :

1. Indikator *input*
2. Indikator *process*
3. Indikator *output*
4. Indikator *outcome*

Indikator-indikator tersebut menjadi pengukuran dalam proses evaluasi suatu program kebijakan yang akan membantu untuk melihat tentang hasil yang tercapai, faktor pendukung dan penghambat yang akan dihadapi dalam pengimplementasian program itu sendiri.

Evaluasi dapat dibedakan sebagai yang terpisah atau sebagai bagian kegiatan integral dari proses perencanaan. Secara umum evaluasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Evaluasi Formatif

Evaluasi jenis ini dilakukan selama tahap pelaksanaan program dengan tujuan untuk memperbaiki program yang sedang berjalan. Evaluasi formatif memberikan umpan balik kepada manajer program mengenai kemajuan yang telah dicapai serta hambatan yang dihadapi. Dengan demikian evaluasi formatif sering juga disebut sebagai evaluasi

monitoring, karena fokus utamanya adalah untuk memantau dan menyesuaikan program agar tetap pada jalurnya.

2. Evaluasi Sumatif

Evaluasi jenis ini dilakukan setelah kebijakan atau program diimplementasikan dan mulai memberikan dampak atau pengaruh terhadap masyarakat. Tujuan dari evaluasi sumatif adalah untuk mengukur efektivitas dari program dalam memberikan dampak nyata pada permasalahan yang ditangani. Dampak yang dimaksud bisa berupa perubahan kondisi fisik maupun sosial yang terjadi akibat *output* kebijakan baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Pemaparan di atas menguraikan jenis-jenis evaluasi di mana evaluasi sumatif merupakan salah satu *bentuk* evaluasi yang dilakukan untuk menilai keseluruhan program setelah selesai dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan penelitian ini di mana penulis ingin melihat dampak dari program kebijakan pemerintah yakni KUR yang sudah diimplementasikan sejak tahun 2007.

Evaluasi sumatif biasanya dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai efektivitas suatu kebijakan atau program pemerintah dalam menangani masalah yang telah diintervensi. Tujuan dari evaluasi sumatif meliputi :

1. Menilai apakah program telah memberikan dampak yang diinginkan bagi individu, rumah tangga dan lembaga.
2. Menilai hubungan antara dampak yang terjadi dengan intervensi program.
3. Mengeksplorasi kemungkinan adanya akibat yang tidak terduga, baik yang bersifat positif maupun negatif.
4. Menganalisis bagaimana program mempengaruhi kelompok sasaran dan menentukan apakah perbaikan kondisi kelompok tersebut benar-benar disebabkan oleh program tersebut atau oleh faktor lain.

Evaluasi kebijakan bertujuan untuk memberikan informasi yang diperlukan bagi pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan secara bijaksana Sudjana (Akbar dan Mohi, 2018). Dalam konteks ini, evaluasi dapat program dapat menyajikan lima informasi dasar yaitu :

1. Data untuk keputusan program, yaitu informasi yang diperlukan untuk menentukan apakah suatu program harus dilanjutkan atau tidak.
2. Indikator keberhasilan, yaitu indikator-indikator yang menunjukkan program mana yang paling berhasil berdasarkan biaya yang digunakan.
3. Efektivitas unsur program, yaitu informasi mengenai elemen-elemen dari setiap program dan kombinasi antar unsur yang paling efektif, sehingga efisiensi pelaksanaan program dapat dicapai.
4. Karakteristik sasaran program, yaitu informasi tentang berbagai karakteristik dari sasaran program sehingga pembuat keputusan dapat mengidentifikasi individu, kelompok, lembaga atau komunitas mana yang paling terpengaruh oleh layanan dari setiap program.
5. Metode baru untuk permasalahan, yaitu informasi mengenai metode-metode baru yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan evaluasi dampak program.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi program merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan menerapkan metode dan model evaluasi tertentu. Dengan pendekatan yang terstruktur, evaluasi program dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai dampak dari kebijakan yang diimplementasikan serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik di masa yang akan datang.

2.2.2 Tinjauan Tentang Dampak Kebijakan

Nutley *et al.*, 2007 (Reed *et al.*, 2021) mendefinisikan dampak sebagai kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman yang meliputi ide, sikap, dan persepsi. Sedangkan, Brewer (2011) mendefinisikan dampak sebagai perubahan yang bervariasi dari waktu ke waktu dan dapat berubah secara positif atau negatif, pada satu titik tiap kali diukur.

Pada dampak kebijakan menurut Dye T. R., 2004 (Winarno, 2016) mencakup semua efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan atau program dalam konteks kehidupan nyata. Jones, 2004 (Islamy, 2009) mendefinisikan dampak kebijakan sebagai akibat dan konsekuensi yang muncul dari pelaksanaan suatu kebijakan program. Berdasarkan beberapa pengertian dampak kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak

kebijakan merujuk pada perubahan yang terjadi sebagai akibat implementasi suatu kebijakan.

Dampak kebijakan dapat dipahami sebagai perubahan dalam kondisi fisik atau sosial yang terjadi akibat dari *output* kebijakan. Ada dua jenis akibat dapat dihasilkan yaitu, akibat yang mampu menciptakan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (*impacts*) atau akibat yang tidak menghasilkan perilaku baru pada kelompok sasaran (*effect*). Definisi dampak ini sejalan dengan pandangan Hosio (2007) yang menyatakan bahwa dampak merupakan perubahan nyata tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan.

Dampak adalah hasil yang ditimbulkan dari intervensi suatu program terhadap kelompok sasaran baik program tersebut mencapai tujuannya ataupun tidak.

Dampak dari kebijakan memiliki berbagai dimensi yang perlu diperhatikan dalam evaluasi. Menurut Winarno (2002) terdapat lima dimensi yang harus dibahas ketika mempertimbangkan dampak dari suatu kebijakan, yaitu :

1. Dampak pada masalah-masalah publik (pada kelompok sasaran) yang diharapkan atau tidak.
2. Dampak pada kelompok di luar sasaran atau sering disebut sebagai eksternalitas.
3. Dampak sekarang dan dampak yang akan datang.
4. Dampak biaya langsung yang dikeluarkan untuk melaksanakan program dan dampak biaya tidak langsung yang ditanggung masyarakat atau kelompok tertentu akibat adanya kebijakan, meskipun tidak secara langsung terlihat.

Sementara itu, dimensi dampak menurut Langbein (Wibawa, 1994) adalah:

1. Dimensi waktu

Dimensi ini penting untuk diperhitungkan karena suatu kebijakan dapat memberikan dampak yang panjang, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Dimensi ini diperlukan untuk melihat dampak dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dikarenakan semakin lama periode evaluasi, maka semakin sulit mengukur dampaknya sebab :

- a. Hubungan kausalitas antara program dengan kebijakan semakin kabur
 - b. Pengaruh faktor-faktor lain yang harus dijelaskan juga semakin banyak
 - c. Jika efek terhadap individu dipelajari terlalu lama, maka akan kesulitan menjaga track record dalam waktu yang sama.
2. Selisih antara dampak aktual dengan dampak yang diharapkan
- Pada dimensi ini evaluator perlu memperlihatkan dampak-dampak yang diharapkan dengan dampak yang tidak diharapkan.
3. Tingkat agregasi dampak
- Dampak yang dihasilkan dari suatu program kebijakan kemudian dirasakan secara individu akan mempengaruhi perubahan di masyarakat secara keseluruhan.
4. Tipe dampak;
- a. Dampak pada proses pembuatan kebijakan
 - b. Dampak pada sikap publik
 - c. Dampak pada kehidupan masyarakat yang bersifat non ekonomis.

Dampak dari suatu kebijakan dapat dirasakan oleh suatu organisasi atau kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak yang dihasilkan dari suatu kebijakan terhadap masyarakat atau kelompok sasaran menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut berjalan sesuai target yang telah ditentukan.

Wibawa (1994) menyatakan bahwa dalam proses evaluasi, terdapat juga unit sosial yang dapat terkena dampak kebijakan yaitu :

1. Dampak individual

Dampak terhadap individu dapat menyentuh berbagai aspek mulai dari dampak psikis, dampak lingkungan, dampak ekonomi, dampak sosial dan personal.

2. Dampak organisasional

Sebuah kebijakan dapat menimbulkan dampak langsung dan dampak tidak langsung terhadap sebuah organisasi atau kelompok. Misalnya, melalui peningkatan kedisiplinan dan semangat kerja akan meningkatkan kinerja dari anggota organisasi atau kelompok itu sendiri.

3. Dampak pada masyarakat

Dampak terhadap masyarakat oleh sebuah kebijakan menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

4. Dampak pada lembaga dan sistem sosial

Kebijakan memiliki dampak yang signifikan pada lembaga dan sistem sosial baik dalam aspek ekonomi, politik, sosial, hingga budaya. Maka penting bagi pengambil kebijakan untuk selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang sebelum menciptakan suatu kebijakan.

Ketika melakukan evaluasi dampak kebijakan, terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Informasi yang valid tentang kinerja kebijakan

Evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat mengenai kinerja kebijakan. Dalam hal ini, evaluasi berfungsi untuk menilai cara pelaksanaan kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen yang diterapkan.

2. Penilaian tujuan dan target

Evaluasi juga berusaha untuk menilai sejauh mana tujuan atau target yang ditetapkan berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Fokus evaluasi ini adalah pada substansi kebijakan publik dengan asumsi bahwa kebijakan dibuat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Namun sering kali ditemukan tujuan telah tercapai, tetapi masalah tidak terselesaikan.

3. Kontribusi terhadap evaluasi lain

Evaluasi kebijakan berupaya memberikan sumbangan pada evaluasi kebijakan lainnya, terutama dari segi metodologi. Ini berarti bahwa evaluasi kebijakan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi berdasarkan penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi

Dampak dari suatu kebijakan mencakup beberapa komponen sebagai berikut:

1. Kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kebutuhan, nilai, dan peluang telah dapat tercapai melalui tindakan kebijakan atau program yang diimplementasikan. Evaluasi kebijakan di sini berfungsi untuk mengungkapkan sejauh mana tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.

2. Pelaksanaan kebijakan, aspek ini bertujuan untuk menilai apakah tindakan yang diambil oleh lembaga pelaksana telah efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Evaluasi kebijakan juga harus memperhatikan isu-isu hak asasi manusia selama pelaksanaan kebijakan. Hal ini penting agar tujuan dan sasaran kebijakan publik dapat tercapai tanpa melanggar hak-hak warga. Selain itu, evaluasi perlu mengetahui dampak dari kebijakan itu sendiri di mana evaluator harus mampu menilai *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari implementasi kebijakan tersebut.

Kesesuaian antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat menjadi fokus utama dalam konteks dampak dari suatu kebijakan. Hal ini diperlukan untuk mengukur sejauh mana kebutuhan, nilai dan kesempatan telah berhasil tercapai melalui kebijakan atau program itu sendiri.

2.2.3 Tinjauan Tentang Kredit Usaha Rakyat

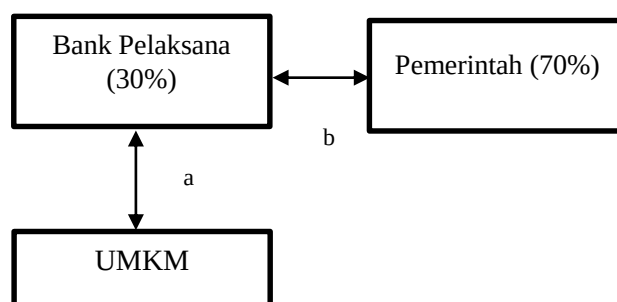
Kredit mikro adalah salah satu metode untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di masyarakat. Menurut Gyimah *and* Boachie (2018) kredit mikro didefinisikan sebagai pinjaman yang diberikan dalam jumlah kecil oleh lembaga keuangan kepada pengusaha kecil atau pemilik usaha produktif untuk periode waktu tertentu sesuai dengan karakteristik usaha.

Pada tahun 1980 sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bernama *Grameen Bank* di Bangladesh berhasil memberikan ratusan ribu pinjaman mikro secara berkelanjutan kepada masyarakat termiskin di negara tersebut untuk membantu mereka mengembangkan usaha (Yunus, 1999). Sejalan dengan konsep ini, pemerintah Indonesia meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini dirancang untuk mengurangi hambatan yang dihadapi UMKM dalam mendapatkan akses kredit, sehingga dapat berkembang dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan serta pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia (Damayanti, 2015).

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu inisiatif pembiayaan mikro yang dilaksanakan di Indonesia sebagai strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Program KUR didefinisikan sebagai upaya strategis untuk mengatasi masalah publik termasuk kemiskinan

(Zulkarnaini, 2015). Program KUR diluncurkan untuk memfasilitasi akses pembiayaan dan meningkatkan kemampuan UMKM dalam mendapatkan pinjaman dari bank. Sasaran dari program ini adalah UMKM yang memiliki potensi namun belum memenuhi kriteria *bankable* (Nugroho, 2016).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi program pemerintah yang bekerja sama dengan bank-bank nasional seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Bukopin, dan seluruh bank pembangunan daerah yang tersebar di Indonesia. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap risiko KUR sebesar 70% sementara sisa risiko sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Damayanti, Akbar, dkk., 2020). Hal ini dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Penyaluran KUR dan Penjaminan KUR

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2025

Keterangan :

- a. Bank pelaksana melakukan penilaian secara individu terhadap calon debitur KUR. Apabila telah dinilai layak maka akan disetujui oleh bank pelaksana yang kemudian diikuti dengan penandatanganan perjanjian kredit oleh debitur.
- b. Bank pelaksana mengajukan permohonan penjaminan kepada Pemerintah dengan penjaminan sebesar 70% yang selanjutnya pemerintah akan menerbitkan sertifikat penjaminan.

Pada awal pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat menjadi program kebijakan yang pro terhadap kemiskinan (*pro poor*), namun mengalami berbagai perubahan kebijakan sesuai arah kebijakan pemberdayaan UMKM. Perubahan ini menyentuh berbagai aspek kebijakan mulai dari perubahan skema penyaluran KUR, perluasan cakupan penerima program KUR, hingga perluasan lembaga penyalur program KUR (Aristanto, 2019). Adapun perubahan kebijakan tersebut diantaranya seperti;

A. Ketentuan Umum Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1. Tidak sedang menerima kredit, pembiayaan modal kerja, investasi dari perbankan, atau kredit program dari pemerintah pada saat permohonan kredit diajukan.
2. Melampirkan surat keterangan lunas dari bank pelaksana atau lembaga pembiayaan sebelumnya jika pelaku UMKM pernah memiliki pinjaman yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.
3. Pelaku UMKM yang akan meminjam KUR Mikro, tidak diwajibkan untuk melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.

B. Jangka Waktu KUR

1. Jangka waktu KUR tidak melebihi tiga tahun untuk modal kerja dan lima tahun untuk kredit atau pembiayaan investasi.
2. Dalam hal perpanjangan, suplesi, dan restrukturasi maka jangka waktu dapat diperpanjang menjadi enam tahun untuk kredit dan sepuluh tahun untuk kredit yang dihitung sejak tanggal perjanjian kredit awal.
3. Jangka waktu kredit untuk usaha perkebunan tanaman keras dapat diberikan langsung maksimal tiga belas tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Perubahan di atas meliputi ketentuan umum KUR dan jangka waktu KUR berubah sesuai arah kebijakan pemberdayaan UMKM. Berdasarkan uraian tersebut kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa debitur diwajibkan untuk melunasi seluruh pinjaman atau kredit sebelum menerima program KUR serta lolos dalam pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Selain itu, program KUR juga terdapat jangka waktu yang sudah diatur sebagaimana yang telah diuraikan.

Peningkatan akses modal bagi pelaku UMKM diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap kemajuan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Hal ini dikarenakan keterbatasan akses modal sangat berpengaruh signifikan terhadap kegagalan UMKM, karena umumnya tidak berpotensi mendapat modal dari lembaga keuangan formal, sehingga perkembangannya lambat dan cenderung *stuck* di tingkat subsisten saja (Ismawan, 2003). Maka dari itu, melalui Inpres nomor 6 tahun 2007 perlu dilaksanakan dalam upaya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM dengan tiga komponen kebijakan yang akan dicapai yaitu :

1. Peningkatan akses sumber pembiayaan bagi UMKM
2. Memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dana non perbankan (Sugiarso, 2018).

Dalam upaya mempercepat pengembangan UMKM sejalan dengan disahkannya RUU Cipta Lapangan Kerja, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk mengubah kebijakan KUR menjadi lebih “pro kerakyatan”. Perubahan tersebut mencakup :

1. Penurunan suku bunga dari 7% menjadi 6%
2. Peningkatan total plafon KUR dari Rp140 triliun menjadi Rp190 triliun pada tahun 2020, dan akan ditingkatkan bertahap hingga Rp325 triliun pada tahun 2024.
3. Peningkatan plafon KUR Mikro dinaikkan dari Rp.25.000.000 menjadi Rp.50.000.000 per debitur.

Perubahan kebijakan KUR tersebut, secara tidak langsung pemerintah mempermudah masyarakat dalam mengakses program ini. Langkah ini sejalan dengan tujuan awal pemerintah dalam meluncurkan program KUR sebagai upaya untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Dengan adanya akses yang lebih baik lagi, diharapkan kemampuan UMKM dalam mengurangi angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan pendapatan

masyarakat akan meningkat (Adam & Lestari, 2017). Hal ini dikarenakan, sebagian besar rumah tangga miskin (RTM) dan berpendapatan rendah menggantungkan hidupnya pada UMKM, sehingga program KUR akan meningkatkan kapasitas UMKM yang berikutnya dapat memperkuat kemampuan untuk keluar dari perangkap kemiskinan dan memperkuat daya tahan RTM dari berbagai permasalahan perekonomian yang dihadapi.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang digunakan pada penelitian ini memiliki hubungan dengan fenomena penelitian pada Dampak program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung.

Kredit usaha Rakyat menjadi salah satu program pembiayaan mikro yang dijalankan di Indonesia sebagai strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan program KUR dinilai sebagai upaya strategis untuk memecahkan permasalahan publik termasuk kemiskinan (Zulkarnaini, 2015).

Kerangka pikir dalam penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Dampak dari Theodoulou and Kofinis (2004) yang berkonsentrasi pada apakah suatu kebijakan sudah memberikan dampak di tempat yang diharapkan. Kemudian, penulis akan mengukur evaluasi dampak tersebut menggunakan teori Langbein (Wibawa, 1994) yang melihat dampak berdasarkan empat dimensi dampak kebijakan, yaitu:

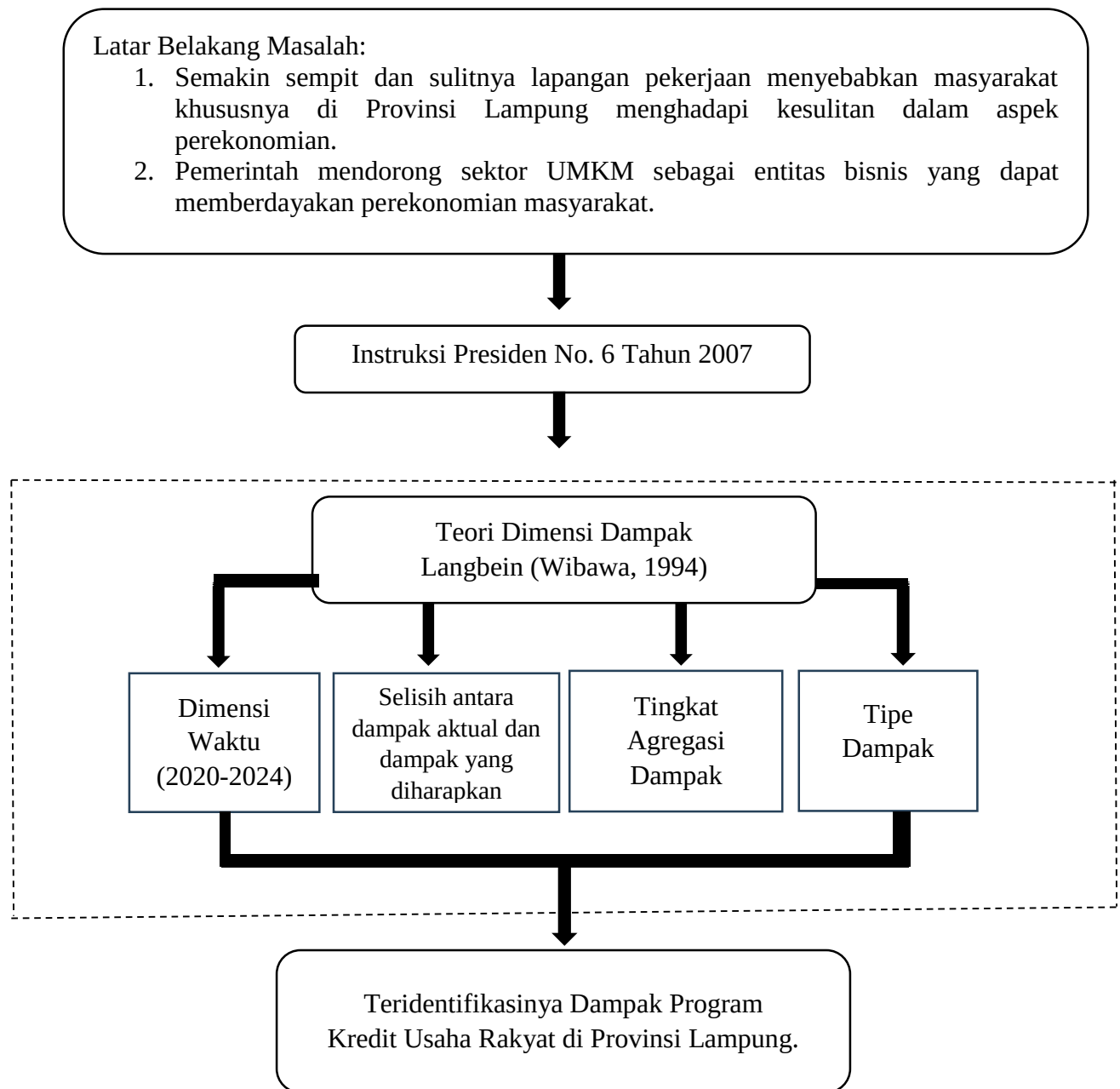
1. Dimensi waktu

Dimensi ini penting untuk diperhitungkan karena suatu kebijakan dapat memberikan dampak yang panjang, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Pada penelitian ini dampak KUR akan dilihat dari tahun 2020-2024. Hal ini dikarenakan jika semakin lama periode evaluasi, maka semakin sulit mengukur dampaknya, sebab :

- a. Hubungan kausalitas antara program dengan kebijakan semakin kabur
- b. Pengaruh faktor-faktor lain yang harus dijelaskan juga semakin banyak

- c. Jika efek terhadap individu dipelajari terlalu lama, maka akan kesulitan menjaga *track record* dalam waktu yang sama.
- 2. Selisih antara dampak aktual dengan dampak yang diharapkan
 Pada dimensi ini peneliti akan memperhatikan :
 - a. Dampak yang diinginkan dan diharapkan
 - b. Dampak yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan
- 3. Tingkat agregasi dampak
 Dampak juga bersifat agregatif, artinya bahwa dampak yang dirasakan secara individu akan membawa pada perubahan di masyarakat secara keseluruhan. Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang dirasakan oleh penerima KUR, yaitu;
 - a. Perubahan pendapatan
 - b. Perubahan kenaikan omzet usaha
 - c. Perubahan pengeluaran rumah tangga
 - d. Perubahan perekrutan tenaga kerja
- 4. Tipe dampak ;
 - a. Dampak pada proses pembuatan kebijakan
 - b. Dampak pada sikap publik
 - c. Dampak pada kehidupan masyarakat yang bersifat non ekonomis.

Peneliti menggunakan teori ini untuk mengukur bagaimana dampak dari implementasi program kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka berpikir di bawah ini.



Keterangan :

➡ Alur Pikir

----- Fokus Penelitian

Gambar 3. Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2024

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena teknik yang digunakan lebih mengarah pada observasi, wawancara, dan analisis data dokumen. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian secara menyeluruh dalam konteks tema tertentu dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan masalah yang terjadi di masyarakat secara mendalam dengan cara mengumpulkan data secara lengkap. Hal ini dikarenakan kelengkapan dan kedalaman data yang diteliti menjadi aspek yang sangat penting.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang melibatkan berbagai pihak terkait. Kemudian dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat mengidentifikasi dampak dari implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting untuk membatasi objek penelitian sehingga penelitian tidak terjebak pada terlalu banyak data yang diperoleh di lapangan. Selain itu, fokus penelitian juga bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti dengan memanfaatkan fokus dan studi yang jelas. Hal ini sejalan dengan yang dipaparkan oleh Sugiyono (2018) bahwa pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan masalah yang ingin dipecahkan.

Fokus pada penelitian ini yaitu dampak program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan teori Theodolou and Kofinis (2004) yang berfokus pada :

Evaluasi dampak yang berkonsentrasi apakah suatu kebijakan sudah memberikan dampak di tempat yang diharapkan. Sejalan dengan penelitian ini, penulis akan mengukur evaluasi dampak tersebut menggunakan teori dimensi dampak kebijakan Langbein (Wibawa, 1994) yaitu :

a. Dimensi waktu

Fokus dari dimensi waktu adalah melihat dampak yang dihasilkan dari program kebijakan Kredit Usaha Rakyat sekarang dan yang akan datang. Pada penelitian ini, penulis akan meneliti dampak program KUR pada periode 2020-2024.

b. Selisih antara dampak aktual dengan dampak yang diharapkan

Peneliti akan berfokus pada dampak yang dihasilkan oleh program KUR dengan memperhatikan :

- 1) Dampak yang diinginkan dan diharapkan
- 2) Dampak yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan

c. Tingkat agregasi dampak

Fokus dari tingkat agregasi dampak adalah dengan melihat dampak yang dihasilkan dari program KUR yang dirasakan secara individual akan dapat mempengaruhi perubahan di masyarakat secara keseluruhan. Perubahan yang dimaksud disini adalah perubahan yang dirasakan oleh penerima KUR, yaitu ;

- 1) Perubahan pendapatan
- 2) Perubahan kenaikan omzet usaha
- 3) Perubahan pengeluaran rumah tangga
- 4) Perubahan perekrutan tenaga kerja

d. Tipe dampak;

Peneliti akan melihat dampak dari program KUR sesuai dengan empat tipe dampak di bawah ini, yaitu :

- 1) Dampak pada proses pembuatan kebijakan, yaitu apa yang akan dilakukan pada kebijakan berikutnya setelah melihat dampak dari program KUR dengan menciptakan kebijakan yang lebih berbasis data, responsif dan efektif terhadap kebutuhan masyarakat.
- 2) Dampak pada sikap publik, yaitu dampak yang sangat bergantung pada seberapa baik kebijakan ini dirancang dan seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terkait program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dampak ini mencakup perubahan persepsi, pandangan, atau respons masyarakat terhadap program KUR, mulai dari penerimaan, penolakan, hingga penyesuaian sikap.
- 3) Dampak pada kehidupan masyarakat yang bersifat non ekonomis.
Dampak ini dapat mencakup peningkatan kemandirian, penguatan struktur sosial, peningkatan kualitas hidup, skill manajerial, pengelolaan keuangan, hingga pengetahuan bisnis.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana peneliti dapat mengumpulkan informasi dan proses studi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk mendukung dan memperkuat hasil penelitian. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Provinsi Lampung tepatnya di Kanwil DJPb Provinsi Lampung serta masyarakat penerima program KUR. Alasan peneliti menjadikan Provinsi Lampung sebagai objek penelitian karena Provinsi Lampung memiliki potensi yang cukup tinggi dalam menyejahterakan masyarakat melalui Penyaluran program KUR di Provinsi Lampung yang sudah mencapai 10,35 triliun rupiah sampai dengan desember 2024.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara, catatan lapangan yang selanjutnya akan diproses dalam tabel triangulasi. Data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata yang kemudian diperkuat dengan dokumentasi lainnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara dan observasi kepada responden yang relevan. Wawancara dan observasi dilakukan dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai topik penelitian untuk menggali informasi secara mendalam mengenai dampak program KUR serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan penerimanya.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk untuk memperkaya informasi terkait topik yang telah ditentukan. Peneliti mendapatkan data sekunder melalui artikel, jurnal, buku, serta informasi terkait KUR yang berada di lokasi penelitian yaitu Kanwil DJPb Provinsi Lampung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data kualitatif yang berfokus pada penghimpunan data berupa pernyataan dan kata-kata. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

3.5.1 Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang telah disusun secara sistematis dan lengkap oleh peneliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Wawancara ini digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh. Hal ini sejalan dengan definisi wawancara menurut (Berger dalam Kriyantono, 2020) bahwa wawancara adalah sebuah metode penghimpunan data atau informasi yang melibatkan percakapan langsung antara peneliti dan informan yang memiliki pengetahuan, pemahaman, pengalaman, atau peran yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

Tabel 3. Data Informan Wawancara

No.	Informan	Nama Informan	Informasi yang Dicari
1.	Kepala seksi PPA IIC Kanwil DJPb Provinsi Lampung	Gwen Adhitya Amalkhan	1) Proses penyaluran Program KUR kepada masyarakat 2) Faktor pendukung dan penghambat penyaluran KUR di Provinsi Lampung 3) Selisih antara dampak actual dan dampak yang diharapkan 4) Dampak pada proses pembuatan kebijakan 5) Dampak pada sikap publik 6) Dampak KUR yang bersifat non-ekonomis
2.	Staff PPA II Kanwil DJPb Provinsi Lampung	Romadhona Puspita Sari	1) Proses <i>monitroring</i> evaluasi (monev) KUR kepada masyarakat 2) Kriteria dan persyaratan tertentu sebagai indikator kelayakan calon debitur KUR 3) Dampak KUR yang bersifat non-ekonomis
3.	Penerima Program KUR	Eldhalia	1) Kemudahan dalam mengakses KUR 2) Manfaat KUR terhadap usaha rintisanannya 3) Kenaikan omzet 4) Pendapatan 5) Pengeluaran rumah tangga
4.	Penerima Program KUR	Dwi Indrawati	1) Kemudahan dalam mengakses KUR 2) Manfaat KUR terhadap usaha rintisanannya 3) Kenaikan omzet 4) Pendapatan 5) Pengeluaran rumah tangga

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

3.5.2 Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang akan diteliti berasal dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung. Kemudian, dokumentasi, jurnal ilmiah, dan beberapa *website* pendukung lainnya. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh (Sugiyono, 2018) bahwa studi dokumen adalah bagian penting dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi sering digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang memuat informasi spesifik yang berasal dari dokumen-dokumen tertulis (Miles and Huberman, 1984).

Tabel 4. Data Dokumen Penelitian

No	Nama Dokumen	Data yang Didapat
1.	Data jumlah penyaluran KUR	Data realisasi penyaluran program KUR di Provinsi Lampung periode 2020—2024
2.	Data jumlah debitur KUR	Data jumlah penerima program KUR di Provinsi Lampung mencakup sektor usaha, lembaga penyalur (perbankan), jumlah debitur dan angka yang disalurkan
3.	Data hasil survei money KUR	Data mencakup biodata debitur, jenis usaha yang dijalankan, alamat usaha, jumlah pinjaman KUR, profit, omzet, jumlah tenaga kerja, hingga riwayat pinjaman calon debitur

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

3.5.3 Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari atau situasi yang diamati. Peneliti secara langsung mengamati kegiatan-kegiatan yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga mempelajari dokumen-dokumen terkait dengan objek penelitian. Hal ini sesuai dengan definisi observasi yang dikemukakan oleh (Creswell, 2009) bahwa observasi adalah proses pengumpulan data langsung dengan mengamati orang dan tempat pada saat penelitian dilakukan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, yaitu dengan menggabungkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian diinterpretasikan melalui narasi dan dianalisis menggunakan kriteria evaluasi dan konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan baik selama pengumpulan data maupun setelah data terkumpul. Pada saat melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi peneliti sudah mulai menganalisis respons dari informan atau narasumber. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa jawaban tersebut belum memadai, maka peneliti akan melanjutkan hingga memperoleh informasi yang dianggap kredibel.

Aktivitas dalam teknik analisis pada data kualitatif seperti;

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Pemeriksaan Kesimpulan dan Verifikasi

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini mencakup beberapa langkah seperti merangkum data, memilih informasi yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian, serta mencari tema dan pola yang muncul. Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi kepada informan KUR mengenai pengalaman penerima KUR, dampak ekonomi yang dirasakan, serta kendala yang dihadapi dalam proses pengajuan dan penggunaan KUR. Selanjutnya, peneliti akan melakukan seleksi data untuk memilih informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian setelah melakukan pengumpulan dan seleksi data, peneliti akan meringkas data untuk mengekstrak inti dari informasi yang didapatkan serta menggolongkan data ke dalam kategori-kategori seperti dampak positif, dampak negatif, hingga kendala yang dihadapi.

3.6.2 Penyajian Data

Setelah melewati tahap pertama, tahap berikutnya adalah memaparkan data dalam penelitian kualitatif. Penyajian data ini berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, atau sejenisnya. Namun, yang paling sering digunakan adalah penyajian naratif. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses pemahaman mengenai apa yang sedang terjadi serta merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Dalam penelitian ini, penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Proses selanjutnya adalah menarik kesimpulan, di mana kesimpulan awal bersifat sementara dan bisa berubah jika tidak ditemukan bukti yang cukup kuat. Kesimpulan

ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya dan biasanya disajikan dalam bentuk deskripsi atau gambaran mengenai objek yang telah diteliti.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian, keabsahan (validitas) data merupakan aspek penting yang berguna untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, kredibel, dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Agar suatu hasil penelitian tidak meragukan dan dapat dipercaya sebagai suatu karya ilmiah maka data hasil penelitian harus terlebih dahulu diuji tingkat kepercayaannya (kredibilitas) (Susanto, dkk. 2023). Kredibilitas data dapat ditingkatkan melalui suatu pengamatan yang diperpanjang dengan menilai kembali kualitas suatu hasil penelitian (penilaian validitas dan reliabilitas). Dalam penelitian ini kriteria keabsahan data yang digunakan adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2019) :

1. *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

Credibility merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai kebenaran data dan informasi yang diperoleh dimana hasil dan penelitian harus dapat diterima dan dipercaya oleh pembaca sebagai informasi yang logis. Apabila suatu hasil penelitian mampu mencapai tujuannya, mendeskripsikan masalah, proses atau interaksi secara kompleks, maka hasil penelitian tersebut dapat dikatakan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Cara yang dilakukan penulis untuk mendapatkan tingkat kredibilitas yang tinggi antara lain:

- a. Pendekatan mendalam dilakukan oleh peneliti untuk mengenal lebih jauh partisipan, situasi lapangan, dan dinamika proses penelitian.
- b. Peneliti melakukan wawancara dan observasi secara sistematis untuk memantau setiap informasi yang terkumpul dengan cermat, rinci, dan mendalam.
- c. Peneliti juga melakukan menggunakan triangulasi metode dengan menguji data atau bukti yang sudah ada dan menggunakannya untuk membuat bukti

yang sudah sesuai dengan tujuan. Hal ini sejalan dengan definisi triangulasi menurut (Norman K. Denkin dalam Susanto, dkk. 2023) bahwa triangulasi merupakan kombinasi atau gabungan beberapa metode yang digunakan untuk menguji fenomena atau kejadian yang saling berkaitan atau terhubung dari berbagai sudut pandang dan perspektif yang berbeda.

2. *Transferability* (Keteralihan)

Transferability adalah kriteria yang menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada kelompok lain dengan kondisi yang serupa. Kriteria ini digunakan untuk menilai tingkat ketepatan suatu hasil penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan seluruh rangkaian penelitian secara lengkap, terperinci, dan sistematis sehingga tujuan penelitian dapat tergambar jelas.

3. *Dependability* (Ketergantungan)

Dependability digunakan untuk menilai sejauh mana hasil penelitian menunjukkan konsistensi ketika penelitian dilakukan oleh peneliti yang berbeda atau pada waktu yang berbeda, tetapi menggunakan metodologi yang sama. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data secara menyeluruh dan mengorganisirnya dengan sebaik mungkin untuk memenuhi kriteria dependabilitas. Kriteria ini memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipertahankan dan dipercaya meskipun dalam kondisi yang berbeda.

4. *Confirmability* (Kepastian)

Confirmability sebagai konsep transparansi mengacu pada kesediaan peneliti untuk mengungkapkan proses dan metodologi penelitiannya secara terbuka sehingga memungkinkan pihak lain untuk menilai hasil penelitian. Dalam penelitian penulis merefleksikan hasil yang diperoleh dengan membandingkannya dengan jurnal-jurnal terkait untuk memastikan konsistensi dan objektivitas.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Secara ekonomi, KUR terbukti memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang sebelumnya sulit menjangkau kredit formal. Banyak usaha rintisan yang berhasil meningkatkan skala dan kapasitas usahanya berkat pembiayaan dari program ini. Selain itu, KUR juga berkontribusi dalam berbagai hal yaitu:
 - a. Meningkatkan pendapatan keluarga
 - b. Meningkatkan daya saing UMKM
 - c. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal hingga penyerapan tenaga kerja.
2. Secara non-ekonomi, program KUR turut mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat. Proses pengajuan kredit, pelaporan usaha, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan usaha membuat pelaku UMKM memiliki pengetahuan dan keterampilan manajerial yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa program KUR bukan hanya bantuan pembiayaan, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.
3. Penelitian ini juga menemukan beberapa dampak yang tidak diharapkan seperti:
 - a. Meningkatnya kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) di tengah situasi ekonomi nasional yang melambat.
 - b. Skema graduasi KUR juga menjadi tantangan tersendiri bagi debitur yang telah mencapai batas penggunaan kredit, namun masih memerlukan dukungan pembiayaan.

4. Secara keseluruhan, program KUR di Provinsi Lampung memberikan dampak yang dominan positif, namun perlu disempurnakan dari sisi regulasi, pendampingan, dan fleksibilitas kebijakan agar dapat lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan pelaku usaha rintisan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti bermaksud memberikan saran kepada pemerintah, lembaga keuangan, serta masyarakat terkait pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dampaknya. Harapannya, saran ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah diharapkan terus melakukan evaluasi kebijakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara berkala, khususnya terkait skema graduasi dan batas maksimum penerimaan program KUR. Penyesuaian regulasi perlu dilakukan secara adaptif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah dan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan program tersebut. Selain itu, pemerintah daerah perlu aktif dalam mengawasi pelaksanaan program KUR dan memberikan pendampingan yang memadai bagi pelaku UMKM agar penggunaan dana program KUR lebih tepat.

2. Bagi Lembaga Penyalur (Perbankan dan Lembaga Keuangan)

Lembaga keuangan diharapkan tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga meningkatkan peran edukatif dalam proses seleksi dan pendampingan debitur KUR. Upaya ini mencakup pemberian literasi keuangan dan pelatihan manajemen usaha agar pelaku UMKM mampu mengelola modal secara efektif dan mengurangi risiko terjadinya kredit bermasalah atau *non-performing loan* (NPL). Selain itu, lembaga keuangan perlu memberikan kelonggaran dalam restrukturisasi pinjaman bagi debitur yang terdampak ketidakstabilan kondisi ekonomi baik nasional maupun global.

3. Bagi Masyarakat dan Pelaku UMKM

Pelaku usaha diharapkan lebih bijak dalam memanfaatkan program KUR dan mengembangkan perencanaan usaha yang matang. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya literasi keuangan dan manajemen risiko usaha agar penggunaan dana pinjaman benar-benar dapat mendorong pertumbuhan usaha secara signifikan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L., & Lestari. E., (2017). "Indonesia's Guaranteed Microfinance Programme (KUR): Lessons from the First Stage of Implementation". *Journal of Southeast Asian Economies* Vol. 34, No. 2 , pp. 322–44. Diakses pada 28 Juli 2021. <https://doi.org/10.1355/ae34-2e>.
- Adha, R. B. (2023). Dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Kesejahteraan Penerima KUR di Indonesia. *Bappenas Working Papers*, 6(2).
- Adju, N. Y., Blongkod, H., & Panigoro, N. (2023). Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Ekonomi*, 28(1), 119-135.
- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi evaluasi kebijakan (Evaluasi beberapa kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Anderson, J.E. 1979. Public Policy Making. Holt. Rinehart and Winston, In. New York.
- Arifqi, M.M. (2019). Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam (Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Khaldun dan Umer Chapra). *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4(2): 125—138
- Aristanto, E. (2019). Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Mendukung Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Jawa Timur. *JMDK Jurnal Manjaemen & Kewirausahaan*, 1-13.
- Basu, S. "Manajemen penjualan." Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE (2001).
- Damayanti, M. (2015). Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Alat Pendorong Pengembangan UMKM di Indonesia. Naskah Kerja TNP2K 27
- Dunn, W. N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Gajah mada University Press.
- Gyimah, P., & Boachie, W. K. (2018). Effect of Microfinance Products on Small Business Growth: Emerging Economy Perspective.
- Hosio, J.E. (2007) *Kebijakan Publik & Desentralisasi, Laksbang*, Yogyakarta.
- Imron Ali. (2012). Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang dalam Menghadapi Perubahan Iklim. Riptek

- Islamia I., & Sunarti, E. (2012) Tekanan sosial, tekanan psikologis, dan kesejahteraan subjektif keluarga di wilayah perdesaan dan perkotaan. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Islamy, I. (2002). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, I. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismawan, B. (2003). Peran Lembaga Keuangan Mikro, *Journal of Indonesian Economy & Business*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- Kamal, A. (2019) *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Khoiriah, N., Yusda, D. D., Oktaria, E. T., & Hairudin, H. (2024). Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Perkembangan UMKM (Studi Kasus B&BRI Unit Kedaton). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 5(2), 111-119.
- Liony. W., & Ihsanudin. (2013). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Agriekonomika*.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis kebijakan publik*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja
- Mudassir, A., Saleh, D., & Nasrulhaq, N. (2020). Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Tanah Lemo Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(2), 381-393.
- Muryadi, A. D. (2017). Model evaluasi program dalam penelitian evaluasi. *Jurnal Ilmiah Penjas (Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran)*, 3(1).
- Nugroho, A.E. (2016). Komersialisme Kredit Usaha Rakyat untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia, Jakarta: *LIPI Press, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pusat Penelitian Ekonomi*,
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Nurcholis, H. (2009). *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Parson, W. (2008). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Prenada Media Group.
- Pidu, Y. R., Boku, Z., & Pakaya, L. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana Kredit Usaha Rakyat dalam Meningkatkan Pendapatan (Studi Kasus Pada Nasabah Bank BRI Unit Telaga Kota Gorontalo). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(2), 41-54.

- Pramata D.S., dkk, 2012. Analisis Pendapatan Nelayan Tradisional Pancing Ulur di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*. Fakultas Ilmu Kelautan. UNPAD
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Kurnia
- Pulungan, S. K., & Jannah, N. (2022). Analisis Upaya Pemerintah Terhadap Produktivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mandailing Natal. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 74-89.
- Putra, I. K., Widayat, W., Putra, G. S. A., Aryasa, I. P. G. C. A., & Pramatha, I. A. (2023). Dampak program kredit usaha rakyat terhadap kesejahteraan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 296-301.
- Reed, M. S., Ferré, M., Ortega, M. J., Blanche, R., Rolfe, L. R., Dallimer, M., Holden, J. (2021). Evaluating Impact from Research: A Methodological Framework. *Research Policy* (50) 104147.
- Saskara, I. N., & Putra, I. G. A. A. S. (2013). Efektivitas dan dampak program bantuan kredit usaha rakyat (KUR) terhadap pendapatan dan kesejahteraan kerja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(10), 44638.
- Sastrawan, B., Samsi, A., & Seran, G. G. (2024). Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat. *Karimah Tauhid*, 3(1), 473-479.
- Sedyastuti, K. (2018). Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancah Pasar Global. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 117-127.
- Setyari, N. P. W. (2012). Evaluasi Dampak Kredit Mikro Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Indonesia: Analisa Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 5(2), 44294.
- Simanjuntak. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volume Penjualan.
- Shafi, M., Liu, J., & Ren, W. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on micro, small, and medium-sized Enterprises operating in Pakistan. *Research in Globalization*, 2.
- Sudaryanto., dan Hanim, A. (2002). Evaluasi Kesiapan UMKM Menyongsong Pasar Bebas Asean (AFTA) : Analisis Perspektif dan Tinjauan Teoritis. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Manajemen*, Vol 1 No 2, Desember 2002.
- Sugiarso. (2018). *Sinergi Pemberdayaan UMKM*. Surakarta: DJPb Kemenkeu RI.
- Suginam, Rahayu, S., & Purba, E. (2021). Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Untuk Pengembangan UMKM. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(1), 21-28.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

- Sunarti E. (2012). Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektif Keluarga di Pedesaan dan Perkotaan. Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB. Bogor [ID]: LPPM.
- Sundari, S. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Kinerja Analis Madya pada Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI. *Universitas Negeri Jakarta*.
- Supardi, S., Yusri, M., Zamri, A. T., & Ak, U. A. (2021). Analisis bauran promosi dan pengaruhnya terhadap kinerja pemasaran usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kampar. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 15(1).
- Suryani, E. S., Wahyulina, S., & Hidayati, S. A. (2019). Akses Usaha Kecil dan Mikro (UKM) terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dampak terhadap Perkembangan Usaha: Kasus UKM di Kota Mataram. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 5(2), 186-202.
- Susanto, H., Syahrial, R., & Budiwan, A. (2022). Analisis kredit usaha tani terhadap kesejahteraan petani di desa kedung lengkong, kecamatan dlanggu, kabupaten Mojokerto. *EKONOMIKA 45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 9(2), 139-150.
- Taali, M., Darmawan, A., & Maduwinarti, A. (2024). *Teori dan Model Evaluasi Kebijakan: Kajian kebijakan kurikulum pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Theodoulou, S. Z., and Kofinis, C., (2004). *The Art of the Game: Understanding Policy Making*. Thomson Wadsworth.
- Thoha. M. (2012). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Tjokroamidjodjo, B. (1990). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV Masagung.
- Tjokroamidjojo, B. (1984). *Pengantar Administrasi pembangunan*, Jakarta: LP3ES.
- Tnanh, T. P., Saito, K., & Duong, B. P. (2019). Impact of Microcredit on Rural Household Welfare and Economic Growth in Vietnam. *Journal of Policy Modeling* (41), 120-139.
- Undari, W., & Lubis, A. S. (2021). Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1), 32-38.
- Wahab, S. A. (2016). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyuni, S., Gunawan, E., Suhartini, S. H., Sinuraya, J. F., Syukur, M., & Ilham, N. (2021). Dinamika kredit program dan perspektif skema baru kredit usaha

rakyat untuk pembiayaan pertanian 2020-2024. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 38(2), 103.

Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widayati, T., GS, A. D., Nugroho, N., Rahayu, S., Boari, Y., Syamil, A., ... & Suryahani, I. (2023). PEREKONOMIAN INDONESIA: Perkembangan & Transformasi Perekonomian Indonesia Abad 21 Terkini. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Widyastuti, A.(2012). Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Universitas Negeri Semarang.

Winamo, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi : Teori, Proses dan Studi Komparatif*. Yogyakarta : CAPS.

Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik*, Jakarta: Pt. Buku Kita.

Wirawan. (2012). *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Profesi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Yunus, M. (1999). *Focus Take-Aways Banker to the Poor Micro-Lending and the Battle Against World Poverty*.

Yusuf, F. (2008), *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Zulkarnaini. (2012). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kawasan Perkotaan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(1), 1–55.